



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MEWUJUDKAN M-LIN (MALUKU SEBAGAI LUMBUNG IKAN NASIONAL)

Anih Sri Suryani
Peneliti Madya
anih.suryani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dengan wilayah perairan seluas 5,8 juta km², Indonesia dikenal sebagai produsen utama perikanan tangkap dan budidaya. Laut di Indonesia menyimpan potensi kekayaan ikan laut sebesar 12 juta ton per tahun. Dari potensi kekayaan maritim Indonesia itu, produksi ikan mampu mencapai 5 juta ton per tahun. Indonesia menjadi produsen ikan tangkap terbesar kedua di dunia setelah Cina. Bahkan beberapa komoditas unggulan seperti udang, tuna, rumput laut, dan kepiting menduduki peringkat teratas dunia.

Terdapat 11 zona sumber ikan tangkap di Indonesia yang selama ini menjadi fokus Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Daerah dengan produksi tertinggi yakni Laut Jawa, Selat Karimata, Natuna, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Melihat tingginya potensi ikan dan banyaknya zonasi sumber ikan tangkap, sudah seharusnya Indonesia menetapkan kawasan Lumbung Ikan Nasional. Berdasarkan Perpres No. 77 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dinyatakan bahwa penataan ruang Kepulauan Maluku bertujuan mewujudkan lumbung ikan yang berkelanjutan. Demikian pula dituangkan dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 bahwa pengembangan wilayah Maluku ditujukan pada optimasi keunggulan wilayah sebagai Lumbung Ikan Nasional.

Sekian tahun berlalu, sejak perpres tersebut ditetapkan, namun hingga kini, M-LIN (Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional), belum juga terwujud. Salah satu alasan yang dikemukakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Rapat Kerja dengan Komisi IV tanggal 23 Maret 2022 adalah karena keterbatasan anggaran. Pada Rapat Kerja tersebut, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah c.q. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dalam rangka pemerataan peningkatan pelaksanaan pembangunan kelautan perikanan di Indonesia bagian timur dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelestarian alam

Lumbung Ikan Nasional adalah kawasan penghasil produksi ikan secara berkelanjutan, diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat sebagai wujud dinamisnya kebijakan ketahanan pangan sekaligus merupakan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan nasional. Pembuatan LIN bertujuan untuk menyejahterakan nelayan, mengoptimalkan hasil sumber daya laut, dan menjaga kelestarian lingkungan laut. Pembangunan M-LIN diharapkan bisa ikut mendorong pemangkasan ongkos produksi ikan yang selama ini tinggi, menghasilkan produksi perikanan dari subsektor perikanan tangkap dan budi daya mencapai 750.000 ton per tahun, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan negara, sekaligus diharapkan menjadikan Maluku sebagai pusat ekonomi kelautan yang baru di Indonesia Timur.

Pembangunan M-LIN bukan semata karena Maluku kelimpahan ikan, melainkan untuk memproduksi sebanyak mungkin ikan yang dihasilkan dari perairan laut sekitar. Oleh karena itu, perlu dibangun pelabuhan terintegrasi yang di dalamnya ada perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan perikanan industri. Pembangunan *Ambon New Port* diharapkan dapat mengintegrasikan pusat pertumbuhan industri pengolahan ikan dan konsolidasi kargo di wilayah Indonesia Timur.

Beberapa persiapan untuk merealisasikan M-LIN sebenarnya telah mulai diupayakan, misalnya Pemerintah Provinsi Maluku telah membuat dokumen perencanaan, *masterplan* serta memfasilitasi penyiapan lokasi kawasan pusat perikanan terpadu seluas 700 ha di Desa Waai dan Liang Pulau Ambon Maluku Tengah, yang 300 ha diantaranya dimanfaatkan untuk *Ambon New Port*. Namun masih ada beberapa tantangan dan kendala dalam mewujudkan M-LIN tersebut. Selain keterbatasan anggaran, tantangan lainnya adalah pembebasan lahan serta permasalahan perizinan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. Oleh karena itu perlu adanya regulasi khusus untuk menyambut Maluku sebagai lumbung ikan nasional agar ekologi dan sumber daya ikan tetap terjaga. Di samping itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukan Kementerian Koordinator Kemaritiman yang melibatkan Kementerian Perikanan serta Kementerian UKM, hambatan lainnya antara lain: SDM, keterbatasan armada, bahan bakar, sumber listrik, rantai dingin, serta interkoneksi pemasaran.

Atensi DPR

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian DPR RI, khususnya Komisi IV. Keterbatasan pasokan dan kenaikan harga berbagai bahan pokok seperti daging sapi, minyak goreng, telur dan sebagainya, hendaknya diikuti dengan kebijakan penyediaan sumber pangan lain misal ikan dan komoditas laut lainnya. Namun pada kenyataannya, program Lumbung Ikan Nasional, yang sedianya akan berpusat di Maluku, kini dipertanyakan kelanjutannya karena belum ada kejelasan. Padahal berbagai *readiness criteria* sudah mulai dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Oleh karena itu, Komisi IV DPRRI perlu terus mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan M-LIK, menyiapkan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan terpadu, kawasan industri perikanan, sampai bandara internasional yang mampu membawa hasil tangkap produk perikanan ke pasar internasional, menetapkan regulasi dan kebijakan penangkapan terukur yang memberikan kuota dan zonasi, serta tetap memberi ruang bagi nelayan lokal/tradisional. Dengan demikian diharapkan M-LIK tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan negara, namun ekologi dan sumber daya ikan tetap terjaga.

Sumber

antaranews.com, 24 Maret 2022;

kumparan.com, 15 Maret 2021;

Raker Komisi VI dengan Kementerian KKP, 23 Maret 2022;

rri.co.id, 24 Maret 2022;

theionomics.com, 23 Maret 2022;



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://puslitbkd_official)



EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Juli Panglima S
 Sri Nurhayati Q.
 Dian Cahyaningrum
 Rafika Sari
 Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Mohammad Teja
 Nur Sholikhah P.S.
 Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022